

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan mengenai stagnasi pengembangan desa tertinggal dari perspektif *siyasah maliyah* studi di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya stagnasi dalam pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data ada empat hasil yang ditemukan. Pertama, keterbatasan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur. Buruknya infrastruktur jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat menghambat perkembangan Nagari Garabak Data. Selain itu, keberadaan Nagari di kawasan hutan lindung menambah kesulitan, karena setiap perbaikan infrastruktur memerlukan izin dari pemerintah pusat. Kedua, keterbatasan dana desa. Dimana dana desa yang ada tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pembangunan di Nagari Garabak Data mengingat lokasi yang jauh di pedalaman dan terisolir. Ketiga, ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan prioritas nasional. Keempat, adanya mispersepsi tentang alokasi dana desa, perangkat desa masih beranggapan bahwa jika status desa naik akan mengurangi alokasi dana desa di Nagari Garabak Data.
2. Dampak yang ditimbulkan dari stagnasi pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data terhadap sosial ekonomi masyarakat yang pertama adalah adanya kemiskinan. Dimana 58% masyarakat di Nagari Garabak Data berada di garis kemiskinan dan sebanyak 25% masyarakat itu masih pengangguran. Dampak yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Garabak Data, yang

dimana masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan tidak menamatkan sekolah dasar, sedangkan untuk pendidikan SMP sampai perguruan tinggi persentasenya hanya sedikit.

3. Tinjauan *siyasah maliyah* terhadap stagnasi pengembangan desa tertinggal di Nagari Garabak Data belum mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan pemerintahan di Nagari Garabak Data masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah maliyah* yang seharusnya diterapkan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada alokasi Dana Desa, pengelolaannya terbatas oleh kewenangan yang tidak mencakup pengelolaan infrastruktur yang lebih luas, yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih adil dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya perhatian terhadap potensi lokal, serta hambatan birokrasi menjadi faktor utama yang menghalangi tercapainya kesejahteraan di Nagari Garabak Data.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai stagnasi pengembangan desa tertinggal dari perspektif *siyasah maliyah* di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus memastikan bahwa pembangunan yang ada fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi spesifik desa, dengan memperhatikan potensi lokal dan tantangan yang ada. Pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak hanya terfokus

pada program jangka pendek. Salah satu langkah penting adalah memastikan adanya perencanaan yang matang, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat merasakan manfaat positif dari pembangunan yang dilaksanakan dan tetap tidak tertinggal dalam kemajuan yang berlangsung di tingkat nasional maupun daerah.

2. Untuk perangkat desa yang melakukan tata kelola pemerintahan desa supaya lebih meningkatkan kinerjanya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan, pengelolaan dana desa, serta perencanaan pembangunan. Hal ini meliputi penentuan masalah yang ada, pengaturan prioritas program pembangunan, serta pelaksanaan program yang tepat guna. Selain itu, sangat penting bagi perangkat desa untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat mengawal pembangunan-pembangunan yang ada di Nagari Garabak Data termasuk mengawal penggunaan dana desa agar digunakan sesuai dengan prioritas nasional sehingga penggunaannya maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Penting bagi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, dari musyawarah desa hingga pelaksanaan program. Dengan mengawasi pembangunan, masyarakat bisa memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Uly. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kec.Margorejo Kabupaten Pati). *Jurnal Administrasi Publik*
- Agusti, Zaki Nugraha. 2020. *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sekaping Kabupaten Pasaman*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,Pekanbaru
- Alfauzi Rois. 2019. *Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2018 Studi di Kabupaten Nganjuk Desa Bajang*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,Malang
- Ardiyanto, Maksimilianus. 2020. *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir
- Bintarto, B. 1983. *Geografi Desa*. Yogyakarta: UP. Spring.
- BPS Kabupaten Solok. 2023. Kecamatan Tigo Lurah Dalam Angka Tahun 2023. Batang Barus: BPS Kabupaten Solok
- Bonar Tigor Nipospos. 2013. *Stagnation On Freedom Of Religion*. Bendungan Hilir : Pustaka Masyarakat Setara
- Chabib, Sholeh & Rochansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djazuli, Ahmad. 2013. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Group
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok. 2023. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*. Solok: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok

- Foster, J. B. 1987. What is Stagnation?. *The Imperiled Economy: Macroeconomics from a Left Perspective* (pp. 59–70). New York: Union for Radical Political Economics
- Ghozali Moudy Raul. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- Harisman, Juli (Sekretaris Nagari Garabak Data). Wawancara 13 November 2024
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Kencana
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. 2021. Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095
- Jajuli S. 2017. Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*
- Maarif, Moh. Ahyar. 2019. Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137-150
- Mubyarto, dkk. 2005. *Ekonomi Rakyat Indonesia*. Dalam Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (Ed.), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi*. Bogor: Sains Yayasan Sajogyo Inti Utama.
- Muhtar, dkk. 2011. Masyarakat Desa Tertinggal. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(2)
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nagari Garabak Data. 2022. *Profil Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok*. Solok: Pemerintah Nagari Garabak Data
- Nirwana, Andri. 2017. *Fiqh siyasah maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH)
- Numan. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta

Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES

Pardinal, (Wali Nagari Garabak Data). Wawancara 13 November

Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Solok

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/Pmk.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Daerah Tertinggal 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD)

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press

Rahardjo, M. Muiz. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ramadhani, Alifa Annisa. 2018. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat. Universitas Lampung, Lampung

Rambe, Juhaidi. 2020. *Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Rauf, Rahyunir. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing

Ratnadila, Nila Sylvi. 2018. Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), 111-128

Rini, D., Dewi, K., & Siregar, M. I. 2021. Analisis Penggunaan Dana Desa terhadap Efektivitas Pembangunan Desa dalam Menerapkan Permendes No. 19 Tahun 2017. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(1).

Sidmag, Mohammad Al Jose. 2018. *Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Supriadi, Deddy. 2003. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam: Siyasaah Maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syamsuri. 2021. Analisis Teoritik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 3(2)

Syarifuddin Amir .2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-375-2023
Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi Dan
Statusnya Sebagai Jalan Provinsi

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 423
Tahun 2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk
Pembangunan Jalan Jalur Kapujan-Rimbo Data, Garabak Data- Batu
Bajanjang Pada Kawasan Hutan Lindung Atas Nama Bupati Solok
Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Seluas 11,45 Ha

Wahidah, J. U. 2023. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peran Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). *The Republic:
Journal of Constitutional Law*, 1(1)

Wardoyo, B. 2020. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs)
Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Bina
Ketenagakerjaan*.

